

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI RETRIBUSI PARIWISATA SEBAGAI
SUMBER PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2015-2018**

Dwi Putri Lestari

Program Studi D3 Akuntansi

STIE Putra Bangsa Kebumen

ptari0228@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pendapatan dari sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas penerimaan pariwisata dan efisiensi penerimaan pariwisata terhadap PAD Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas dari penerimaan pariwisata Kabupaten Kebumen tahun 2015 sebesar 88,16%, tahun 2016 sebesar 88,68%, tahun 2017 sebesar 89,45%, tahun 2018 sebesar 85,92% dengan kriteria cukup efektif. Efisiensi penerimaan sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Kebumen tahun 2015 sebesar 0,02%, tahun 2016 sebesar 0,02%, tahun 2017 sebesar 0,02%, tahun 2018 sebesar 1,03% dengan kriteria sangat efisien.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), pariwisata, efektivitas, efisiensi.

ABSTRACT

The purposes of this research aimed to analyze the effectiveness and efficiency of tourism sector to Kebumen PAD during 2015-2018. This is research used the analysis of the effectiveness of tourism sector acceptance and efficiency of tourism sector acceptance to Kebumen PAD. The results of this study showed the effectiveness of tourism sector retribution of Kebumen in 2015 was 88,16%, in 2016 was 88,68%, in 2017 was 89,45%, in 2018 was 85,92%, with the criteria "effective enough". The efficiency of tourism to PAD of Kebumen in 2015 was 0,02%, in 2016 was 0,02%, in 2017 was 0,02%, in 2018 was 1,03% with criteria of "very efficient."

Keyword: Pendapatan Asli Daerah (PAD), tourism, effectiveness, efficiency

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan hal yang penting bagi suatu daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya, sehingga pemerintah perlu pembiayaan dalam melaksanakan pembangunan, penyelenggaran tugas dan fungsi pemerintahan. Salah satu sumber dana dalam membiayai penyelenggaran pemerintah adalah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dari keadaan tersebut maka pemerintah perlu mengetahui sumber-sumber penerimaan PAD yang dapat memberikan sumbangan tinggi dalam meningkatkan daerahnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Tersedianya sumber-sumber pendapatan daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana undang-undang tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah menjadi lebih otonom dan mandiri sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terdapat banyak tempat pariwisata yang sedang di Kabupaten Kebumen yang mulai berkembang pesat dan berpotensi menyumbang untuk Pendapatan Asli Daerah. Berbagai obyek wisata di Kabupaten Kebumen antara lain, Pantai Menganti, Pantai Karang Agung, Pantai Watu Bale, Goa Jatijajar, Bukit Pentulu Indah dan masih banyak lainnya. Retribusi dari sektor pariwisata ini diharapkan dapat memberikan sumbangan cukup besar terhadap PAD Kabupaten Kebumen, sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Kebumen.

Besarnya tarif retribusi yang harus dibayarkan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2000 yang telah diperbarui dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Setiap pengunjung yang datang

akan dikenakan retribusi dalam bentuk karcis masuk sebagaimana telah diatur dalam Perda Nomor 07 Tahun 2003. Hanya saja besarnya memiliki perbedaan yang cukup terasa antara tempat wisata satu dengan lainnya.

Perbedaan itu, salah satunya karena ada sebagian yang pengelolaannya sudah optimal tetapi ada juga yang belum optimal. Padahal pengelolaan optimal bisa menjadi daya tarik yang lebih tinggi bagi wisatawan karena tidak hanya objek wisata itu sendiri yang ditawarkan tetapi juga adanya fasilitas lain. Penulis melihat bahwa Kabupaten Kebumen memiliki sektor pariwisata yang sangat banyak dan cukup bagus. Pengelolaan yang optimal tentunya akan meningkatkan daya saing antar wisata sehingga kepariwisataan akan menjadi lebih hidup.

Tabel I.1
Realisasi Penerimaan Target
Pariwisata dan Realisasi
Pariwisata

Tahun Anggaran	Target Penerimaan Sektor Pariwisata (Rp)	Realisasi Penerimaan Pariwisata (Rp)
2015	6.412.700.000	5.653.204.994
2016	6.600.000.000	5.852.882.245
2017	6.600.000.000	5.903.584.045

Sumber: DISPORAWISATA Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Tabel I.1 Target Penerimaan Sektor Pariwisata yang ditentukan oleh pemerintah dan realisasi penerimaan pariwisata pada tahun anggaran 2015 sampai 2017 yaitu meningkat secara signifikan yaitu pada tahun 2015 target pendapatan sektor pariwisata yaitu Rp 6.412.700.000 dan untuk realisasinya yaitu Rp 5.653.204.994, Pada tahun 2016 target meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp 6.600.000.000 dan realisasinya juga meningkat yaitu Rp 5.852.882.245, dan pada tahun 2017 target penerimaan pendapatan pariwisata juga meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp 6.600.000.000 dan realisasinya yaitu Rp 5.903.584.045. Akan tetapi permasalahan yang timbul adalah sulitnya mencapai target yang diperkirakan

lantaran laju pertumbuhan kunjungan wisatawan sepanjang tahun masih dibawah ekspektasi hal ini bisa disebabkan karena Kabupaten Kebumen belum memuat semua aspek mulai dari budaya, belanja dan kuliner sehingga diharapkan pemerintah tidak hanya fokus pada angka jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kebumen saja tetapi juga perlu peningkatan nilai belanja wisatawan yang bisa menjadi sumber pendapatan sektor pariwisata. Berdasarkan target dan realisasi sektor pariwisata yang meningkat tersebut ketika nanti dibandingkan dengan pendapatan asli daerah apakah cukup efektif dan ketika nanti retribusi pariwisata tersebut dikaitkan dengan PAD apakah cukup efisien. Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul “**Analisis Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Pariwisata sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2018**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tingkat efektifitas pemungutan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015-2018?
- b. Bagaimana tingkat efisiensi pemungutan retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015-2018?

Batasan Masalah

- a. Laporan Realisasi Retribusi Pariwisata Daerah di Kabupaten Kebumen tahun 2015 – 2018.
- b. Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen tahun 2015 – 2018.

Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pendapatan dari sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen.
- b. Untuk mengetahui efisiensi pendapatan dari sektor pariwisata.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Menurut Bastian (2006: 338). Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah dilakukan atas prakarsa sendiri dan berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2012:101)

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan hak tidak perlu dibayar lagi oleh pemerintah. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pungutan daerah adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Keuangan Daerah

Menurut Deddy (2004: 379)

keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Efektivitas Retribusi Pariwisata

Menurut Mardiasmo (2004: 134), efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya dikatakan telah berjalan dengan efektif. Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Efisiensi Retribusi Pariwisata

Menurut Dayanto *et al* (2016)

efisiensi retribusi pariwisata adalah

menggambarkan pencapaian realisasi penerimaan retribusi pariwisata dengan menggunakan biaya pemungutan retribusi pariwisata yang terendah oleh pemerintah Kabupaten Kebumen.

Pengertian Pariwisata

Wisata merupakan dimana suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mengunjungi suatu tempat wisata ataupun reaksi yang bersifat sementara. Menurut Pitana (2000:200) mengatakan bahwa, Pariwisata adalah suatu sistem yang multikompleks, dengan berbagai aspek yang saling terkait dan saling mempengaruhi antar sesama.

Menurut Undang-Undang Pariwisata Pasal 14 Nomor 10 tahun 2009 kegiatan dan usaha pariwisata terdiri dari :

- a. Usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, atau daya tarik wisata buatan manusia.
- b. Usaha pembangunan atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, buat angkutan transportasi reguler atau umum.
- d. Usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan atau jasa pelayanan dan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk penyelenggaraan ibadah.
- e. Usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan atau penyajian.
- f. Usaha penyediaan layanan penginapan untuk wisata yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- g. Usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Objek Pariwisata

Objek wisata merupakan suatu tempat yang mempunyai keindahan dan dapat dijadikan sebagai tempat hiburan bagi seseorang dalam upaya memenuhi kebutuhan rohani. Potensi wisata merupakan kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dalam suatu wilayah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, alam dan manusia serta hasil karya manusia itu sendiri. Menurut Basri dalam Zebua (2017:162) salah satu yang bisa diandalkan untuk memperbesar

sisi pendapatan yaitu penanganan bidang *service* sektor pariwisata. Sektor pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar dan terkuat di dunia. Pariwisata merupakan menyumbangkan terbesar dalam pemasokan pendapatan terutama dalam hal perekonomian masyarakat dan negara. Kegiatan pariwisata sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat mulai dari masyarakat yang ada di kota sampai pada masyarakat yang ada di desa

Wisatawan

Menurut Kusumaningrum (2009: 17) wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah biasanya benar-benar ingin menghabiskan waktunya untuk bersantai, menyegarkan pikiran dan ingin melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari dengan cara menikmati keindahan di tempat tersebut. Jadi bisa juga dikatakan wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat lain yang jauh dari rumahnya bukan dengan alasan rumah atau kantor (Kusumaningrum, 2009: 17)

Penelitian Terdahulu

Menurut Nawangsih (2018) hasil dari penelitian ini adalah kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2010 sebesar 0,46%, tahun 2011 sebesar 0,83%, tahun 2012 sebesar 0,96%, tahun 2013 sebesar 0,78%, tahun 2014 sebesar 0,62%, tahun 2015 sebesar 0,65%, dan tahun 2016 sebesar 0,71%.

Menurut Yanti *et al* (2018) Perkembangan pendapatan objek wisata di Kota Padang daritahun 2013-2017. Pendapatan retribusi objek wisata di Kota Padang dipengaruhi oleh adanya hari libur sekolah, Hari Raya Idul Fitri dan hari-hari libur nasional lainnya. Pada tahun 2015 pendapatan objek wisata di Kota Padang mengalami penurunan dikarenakan Kota Padang baru melakukan pembenahan terhadap objek wisata di Kota Padang. Namun pada tahun 2016 sampai 2017 pendapatan objek wisata di Kota Padang terus mengalami peningkatan dimana pemerintah Kota Padang bersama dinas pariwisata dan kebudayaan terus melakukan perbaikan sehingga objek wisata di Kota Padang tampil lebih menarik dan tertata. Hal ini tentunya akan menambah daya Tarik pengunjung untuk dating berwisata ke Kota Padang. Peningkatan pendapatan objek wisata ini belumlah signifikan. Oleh karena

itu pemerintah Kota Padang harus terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan objek wisata dengan cara menambah jumlah atraksi wisata di setiap DTW terutama pada hari-hari libur dimana jumlah pengunjung yang datang lebih banyak.

Menurut Prijanto pada tahun 2004 kontribusi sektor pariwisata terhadap APBD nasional sebesar Rp 113,78 triliun atau 5,01 % dari total APBD Rp 2.273,14 triliun. Pada tahun 2005 kontribusi pariwisata meningkat menjadi Rp 146,80 triliun atau 5,27 % dari total APBD nasional Rp 2.784,90 triliun. Pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 143,62 triliun atau 4,30 % dari total APBD Rp 3.339,50 triliun. Sementara pada tahun 2007, persentase kontribusi pariwisata turun tipis menjadi 4,29 % bila dibandingkan dengan total APBD nasional, meskipun jumlah kontribusi pariwisata tetap naik dari tahun sebelumnya menjadi Rp 169,67 triliun.

Menurut Yuningsih (2005) perkembangan pendapatan dari obyek wisata Pantai Pangandaran secara umum meningkat rata-rata 13,64 % pertahunnya atau rata-rata pendapatan sebesar Rp 2.685.720.083 pertahunnya. Peningkatan yang cukup menonjol terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 84,07 % hal ini disebabkan karena kondisi politik yang sudah kondusif. Sedangkan penurunan terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 38,75% hal ini disebabkan karena kondisi politik nasional dimana waktu itu menjelang pemilihan umum, sehingga banyak masyarakat yang turun ke jalan untuk berkampanye.

Tabel Tingkat Efektivitas Penerimaan Sektor Pariwisata

Tahun Anggaran	Target Penerimaan Sektor Pariwisata (Rp)	Realisasi Penerimaan Sektor Pariwisata (Rp)	Selisih (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2015	6.412.700.000	5.653.204.994	759.495.006	88,16	Cukup Efektif
2016	6.600.000.000	5.852.882.245	755.535.775	88,68	Cukup Efektif
2017	6.600.000.000	5.903.584.045	696.415.955	89,45	Cukup Efektif
2018	144.095.000	123.813.850	20.281.120	85,92	Cukup Efektif

Sumber: DISPORAWISATA Kabupaten Kebumen Tahun 2019

Berdasarkan tabel.IV.4 maka dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas retribusi pariwisata selama 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dengan hasil prosentase sebesar 88,16%

METODE

Objek penelitian ini adalah data retribusi pariwisata dan data Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan dengan objek penelitian ini yaitu kepala dan staf Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen dan Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kebumen (DISPORAWISATA). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan dan dokumen-dokumen yang berada di kantor, buku-buku kepustakaan, literatur dan sumber lain.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kuantitatif. Metode pengumpulan data yang berkaitan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Penerimaan Sektor Pariwisata

Penelitian yang dilakukan pada Dinas Pariwisata adalah untuk menganalisis efektivitas dan penerimaan pendapatan pariwisata dan efisiensi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 sampai dengan 2018 data diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen

dengan kriteria cukup efektif, tahun 2016 dengan hasil prosentase sebesar 88,68% dengan kriteria cukup efektif, tahun 2017 dengan hasil prosentase sebesar 89,45% dengan kriteria cukup efektif, tahun 2018

dengan hasil prosentase 85,92% dengan kriteria cukup efektif. Tingkat efektivitas penerimaan pendapatan pariwisata dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi. kriteria cukup efektif dengan prosentase paling besar yaitu pada tahun 2017. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas mengalami penurunan sebesar 3,5% karena target penerimaan sektor pariwisata dan realisasi penerimaan sektor pariwisata menurun. Meskipun masuk dalam kriteria cukup efektif akan tetapi realisasi

penerimaan sektor pariwisata pada tahun 2018 menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya hal ini bisa disebabkan karena Kota Kebumen belum memuat semua aspek mulai dari aspek belanja sehingga diharapkan pemerintah tidak hanya fokus pada angka jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kebumen saja akan tetapi juga perlu peningkatan nilai belanja wisatawan yang bisa menjadi sumber pendapatan sektor pariwisata.

Efisiensi Penerimaan Sektor Pariwisata

Tabel Tingkat Efisiensi Penerimaan Sektor Pariwisata

Tahun anggaran	Biaya Pemungutan Retribusi Pariwisata (Rp)	Realisasi Retribusi Pariwisata (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
2015	127.909.191	5.653.205.094	0,02%	Sangat Efisien
2016	127.909.191	5.903.584.045	0,02%	Sangat Efisien
2017	127.909.191	5.852.882.245	0,02%	Sangat Efisien
2018	127.909.191	123.813.850	1,03%	Sangat Efisien

Sumber: DISPORAWISATA Kabupaten Kebumen Tahun 2019

Berdasarkan tabel IV.2 maka dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi Retribusi Pariwisata selama 4 tahun secara umum dapat dikatakan sangat bagus dimana pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 sudah memasuki kriteria sangat efisien. Pada tahun 2015 tingkat efisiensi retribusi pariwisata adalah sebesar 0,02% karena biaya pemungutan Retribusi Pariwisata yaitu sebesar 127.909.191 sedangkan realisasi penerimaan retribusi pariwisata sebesar 5.653.205.094. Pada tahun 2016 tingkat efisiensi retribusi pariwisata adalah sebesar 0,02% karena biaya pemungutan retribusi pariwisata yaitu sebesar 127.909.191 sedangkan realisasi penerimaan retribusi pariwisata adalah sebesar 5.903.584.045. pada tahun 2017 tingkat efisiensi retribusi pariwisata adalah sebesar 0,02% karena biaya pemungutan retribusi pariwisata yaitu 127.909.191 sedangkan realisasi penerimaan retribusi pariwisata adalah sebesar 5.852.882.245. Pada tahun 2018 tingkat efisiensi retribusi pariwisata adalah sebesar 1,03 karena biaya pemungutan retribusi pariwisata yaitu 127.909.191 sedangkan realisasi penerimaan retribusi pariwisata adalah sebesar 123.813.850. Meskipun sudah memasuki kriteria sangat efisien akan

tetapi pada tahun 2018 realisasi penerimaan retribusi pariwisata menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena kurangnya penyediaan transportasi untuk kebutuhan dan pariwisata dan akses jalan yang kurang memadai untuk menuju tempat wisata sehingga menimbulkan kurangnya minat pengunjung untuk berwisata.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas retribusi pariwisata selama 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dengan hasil prosentase sebesar 88,16% dengan kriteria cukup efektif, tahun 2016 dengan hasil prosentase sebesar 88,68% dengan kriteria cukup efektif, tahun 2017 dengan hasil prosentase sebesar 89,45% dengan kriteria cukup efektif, tahun 2018 dengan hasil prosentase 85,92% dengan kriteria cukup efektif. Tingkat efektivitas penerimaan pendapatan pariwisata dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi. kriteria cukup efektif dengan prosentase paling besar yaitu pada tahun 2017. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas mengalami penurunan sebesar 3,5%. karena target penerimaan sektor pariwisata dan realisasi penerimaan sektor pariwisata menurun. Meskipun masuk dalam kriteria cukup efektif realisasi penerimaan sektor pariwisata masih cukup jauh perbedaannya untuk memenuhi target sektor pariwisata yang ditetapkan. Hal ini bisa disebabkan karena Kota Kebumen belum memuat semua aspek mulai dari budaya, belanja, kuliner, sehingga diharapkan pemerintah tidak hanya fokus pada angka jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kebumen saja akan tetapi juga perlu peningkatan nilai belanja wisatawan yang bisa menjadi sumber pendapatan sektor pariwisata.
2. Tingkat efisiensi Retribusi Pariwisata selama 4 tahun secara umum dapat dikatakan sangat bagus dimana pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 sudah memasuki kriteria sangat efisien. Pada tahun 2015 tingkat efisiensi retribusi pariwisata adalah sebesar 0,02% karena biaya pemungutan Retribusi Pariwisata yaitu sebesar 127.909.191 sedangkan realisasi penerimaan retribusi pariwisata sebesar 5.653.205.094. Pada tahun 2016 tingkat efisiensi retribusi pariwisata adalah sebesar 0,02% karena biaya pemungutan retribusi pariwisata yaitu sebesar 127.909.191 sedangkan realisasi

penerimaan retribusi pariwisata adalah sebesar 5.903.584.045. pada tahun 2017 tingkat efisiensi retribusi pariwisata adalah sebesar 0,02% karena biaya pemungutan retribusi pariwisata yaitu 127.909.191 sedangkan realisasi penerimaan retribusi pariwisata adalah sebesar 5.852.882.245. Pada tahun 2018 tingkat efisiensi retribusi pariwisata adalah sebesar 1,03% karena biaya pemungutan retribusi pariwisata yaitu 127.909.191 sedangkan realisasi penerimaan retribusi pariwisata adalah sebesar 123.813.850. Meskipun sudah memasuki kriteria sangat efisien akan tetapi pada tahun 2018 realisasi penerimaan retribusi pariwisata menurun drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena kurangnya penyediaan transportasi untuk kebutuhan dan pariwisata dan akses jalan yang kurang memadai untuk menuju tempat wisata sehingga kurang memadai untuk menuju tempat wisata sehingga menimbulkan kurangnya minat pengunjung untuk berwisata.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran dengan maksud dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen perlu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan melakukan promosi selain itu tentunya perlu diiringi dengan kualitas pelayanan yang baik, dengan melakukan pengawasan, pengembangan, serta komunikasi dan pembinaan terhadap industri pariwisata untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, sehingga nantinya kontribusi sektor pariwisata bisa lebih besar.
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen perlu meningkatkan pengembangan dengan melakukan penataan objek wisata dan melestarikan tradisi, nilai, adat istiadat melalui penyelenggaraan *event-event* daerah sehingga nantinya dapat optimal menyerap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Rajawali Press. Jakarta.
- Adisasmita, R. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Danyanto, Suharno, dan B. Widarno. 2016. Analisis Potensi, Efektivitas, Dan Efisiensi Retribusi Pariwisata Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 12(4): 398-406.
- Deddy, S. B. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Halim, A. 2012. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- . 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- . 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Juliprijatno, W. 2014. Analisis Potensi Sektor Pariwisata Di Kabupaten Magelang. *Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang* 40 (2): 70-85
- Kusumaningrum, D. 2009. Persepsi Wisatawan Nusantara Terhadap Daya Tarik Wisata di Kota Palembang. *Tesis. PS Magister Kajian Pariwisata. Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Nawangsih, D. 2018. Kontribusi Retribusi Sektor Pariwisata Dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi* 7(2):110-118
- Nordiawan, D. Dan H. Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Oka, A.Y. 2008. *Pemasaran Pariwisata*. Bandung Angkasa. Bandung
- Pemerintah Kabupaten Kebumen. 2016. www.kebumenkab.go.id. Diakses pada 2 Januari 2019 pukul 12:19 WIB.
- Pitana, I dan Putu, G. G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Andi. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Legalitas. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Syaukani, A., Gaffar, dan Rasyid. 2012. *Otonomi Daerah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- . Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- . Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. 16 Januari 2009.
- . Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004.
- . Pariwisata Pasal 14 Nomor 10 Tahun 2009. 16 Januari 2009.
- . Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

- Yanti, N. Dan R. Hadya. 2018. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan PAD Kota Padang. *Jurnal Benefita* 3(3):370-379
- Yuningsih, N. 2005. Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Potensi Objek Wisata Pantai Pangandaran Di Kabupaten Ciamis Jawa Barat. *Skripsi*. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang. Semarang
- Zebua, M. 2016. *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah*. Edisi Revisi. DEEPUBLISH. Yogyakarta.

